

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Thailand mempunyai enam pembagian wilayah yang salah satunya adalah wilayah Thailand Selatan. Thailand Selatan mempunyai sisi yang berbeda dari segi sosial, budaya dan agamanya dibandingkan dengan wilayah yang lainnya. Terdapat tiga daerah provinsi yaitu Patani, Yala, dan Narathiwat dengan etnis dan agama yang sangat berbeda di antara wilayah Thailand lainnya.¹ Thailand Selatan penduduknya terkenal dengan ras melayu dan menganut agama Islam. Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat Thailand lainnya yang beretnis Thai dan menganut agama Budha. Perbedaan ini tidak bisa lepas dari sejarah masa lalu yang membuat Thailand Selatan berbeda dengan wilayah lainnya. Wilayah Thailand selatan merupakan bagian dari Kesultanan Kedah dan Patani yang didirikan oleh orang-orang Melayu.² Wilayah Thailand Selatan menjadi bagian dari Thailand ketika masih bernama Siam sejak penghujung abad ke-18.³ Thailand Selatan dapat menjadi kekuasaan Siam pada saat itu karena keberhasilan yang di dapatkan Kerajaan Siam atas wilayah tersebut. Perbedaan etnis dan agama yang di rasakan oleh penduduk di Thailand Selatan membuat kesenjangan tersendiri bagi penduduk asli Thailand. Kesenjangan

¹ Kementrian Luar Negeri Indonesia, '*Pertemuan dengan tim SBPAC Thailand*' <[http://www.kemlu.go.id/songkhla/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Pertemuan-dengan-Tim-dari-Southern-Border-Province-Administrative-Center-\(SBPAC\),-11-Maret-2016-.aspx](http://www.kemlu.go.id/songkhla/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Pertemuan-dengan-Tim-dari-Southern-Border-Province-Administrative-Center-(SBPAC),-11-Maret-2016-.aspx)> [23 Desember 2016].

² Bryn, Ben. '*The interpreter religion Sothern Thailand conflict*' <<https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/religion-southern-thailand-conflict>> [Diakses pada 25 Desember 2016].

³ Gryffin, '*History of Thailand*', Nations Online <<http://www.nationsonline.org/oneworld/History/Thailand-history.htm>> [Diakses pada 25 Dec 2016].

inilah yang menjadi pemicu sebuah konflik antara pemerintah Thailand dan wilayah Thailand Selatan.

Konflik yang terjadi di Thailand Selatan berlangsung sejak tahun 1902 Masehi.⁴ Bermula dari penakhlukan Patani Raya oleh Kerajaan Thailand yang pada saat itu bernama Siam ketika otoritas penduduk di wilayah Thailand Selatan harus sepenuhnya mengikuti kebijakan dari kerajaan Thailand. Salah satu bentuk kebijakannya adalah penggunaan bahasa dan aksara Thailand yang diwajibkan kepada seluruh penduduk yang sebelumnya menggunakan bahasa Melayu dan harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Akibat yang ditimbulkan dari peniadaan sejumlah budaya dan peraturan masyarakat yang telah ada ini, membuat penduduk di wilayah Thailand Selatan menentang dengan keras. Penduduk yang menentang ini kemudian mencoba untuk bertindak dengan melakukan gerakan-gerakan separatis yang bertujuan untuk memperoleh otoritas dan otonomi khusus untuk wilayah mereka. Rasa ingin memerdekakan diri dari kerajaan Thailand juga muncul pada diri mereka karena marjinalisasi yang dialami oleh masyarakat Thailand Selatan semakin terpampang nyata. Masalah-masalah seperti kesenjangan ekonomi, pembangunan, pendapatan perkapita hingga masalah etnis juga dialami oleh masyarakat Thailand Selatan. Hal ini menjadi sebuah pengaruh yang cukup besar pada munculnya konflik seperti kekecewaan dan juga kecemburuan sosial. Pada akhirnya kebanyakan dari penduduk Thailand Selatan hanya bisa membuat keputusan untuk mengatur wilayah mereka sendiri dengan cara membuat otonomi atau langsung memisahkan diri dari kerajaan Thailand demi kesejahteraan mereka.

Tahun 2000 menjadi momen yang sangat tepat bagi pemerintah Thailand untuk dapat menyelesaikan konflik yang ada di Thailand Selatan.⁵ Penangkapan tokoh-tokoh penting dari

⁴ Ibid hal 42

⁵ Dulyakasem, U (1984) *Muslim-Malay separatism in Southern Thailand : Factors underlying The political revolt*. In Joo-Jock, Lim & Vani S (eds.) *Armed separatism in Southeast Asia*. Singapore:ISEAS.

kelompok pemberontak Thailand Selatan yang sedang bersembunyi di wilayah Malaysia menjadi langkah pasti agar dampak pemberontakan tidak menyebar. Malaysia menjadi negara pertama yang dipilih oleh pemerintah Thailand untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Thailand Selatan. Penangkapan pemberontak yang telah tersebar di seluruh wilayah Thailand dan Malaysia dilakukan di daerah-daerah yang diduga mempunyai basis kelompok Islam radikal yang ada di kedua negara tersebut. Penelusuran ini dilakukan karena dengan tertangkapnya para pemberontak yang ada di sekitar wilayah persembunyian mereka, semakin mudah pemerintah Thailand memahami masyarakat Thailand Selatan untuk lebih bekerjasama dalam menangani konflik ini.

Setelah dilakukannya otonomi baru pada penduduk Thailand Selatan, dilakukan penangkapan pemberontak dan penerapan otonomi khusus bagi wilayah Thailand Selatan, ternyata hal itu tidak berpengaruh besar dan memunculkan konflik baru yang terjadi di tahun 2004.⁶ Konflik ini terjadi karena badan otonomi khusus yang telah di bentuk, di bubarkan tanpa alasan oleh pemerintah Thailand. Pembubaran ini menyebabkan banyaknya pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa kelompok penduduk yang ada di Thailand Selatan terhadap pemerintah Thailand.⁷ Tidak sampai di situ saja, meluasnya konflik yang terjadi memunculkan berbagai pemberontakan dari penduduk setempat. Pada saat penangkapan para milisi Thailand Selatan di Masjid Krue Se yang merupakan masjid yang paling dihormati oleh masyarakat di wilayah tersebut, ternyata menyulut sebuah konflik baru yang lebih menjurus pada agama. Penembakan dan perusakan yang

⁶ Ibid hal 87-89

⁷ Anthony, 'Thailand fighting the superpower- understanding the greater global chessboard', *Global Research* <<https://www.globalresearch.ca/thailand-fighting-the-superpower-understanding-the-greater-global-chessboard/5362210>> [Diakses pada 15 September 2017].

terjadi di masjid tersebut menjadi sebuah masalah yang sensitif dan dapat mempengaruhi proses penyelesaian konflik pada saat itu.⁸

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Thailand agar dapat menyelesaikan konflik di wilayah Thailand Selatan. Pada tahun 2005, Akhirnya Pemerintah Thailand membuat otoritas khusus untuk penduduk selatan dengan membantu di sektor ekonomi.⁹ Pemberian subsidi dan pemberian otonomi khusus bagi warga Thailand Selatan ini membuat keadaan menjadi membaik. Keadaan yang sebelumnya cukup mencekam setelah diberikan sebuah otonomi baru oleh pemerintah Thailand, dapat menjadi tenang dan masyarakat kembali melakukan aktifitasnya tanpa ada rasa khawatir. Harapannya agar penduduk di Thailand Selatan dapat terakomodasi untuk kepentingan-kepentingan mereka dalam memperoleh kesejahteraan seperti sebelumnya.

Tertulis dalam sejarah bahwa Indonesia dan Thailand telah memulai kerjasama bilateralnya sejak 7 Maret 1950.¹⁰ Bentuk bilateral ini, berujung kepada kerjasama yang terjalin yakni meliputi ekonomi, iptek dan juga budaya. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa telah lebih dari 68 tahun kerjasama ini terjalin dan banyak sekali hal yang telah terjadi antara kedua negara termasuk ketika Thailand Selatan sedang ricuh. Kala itu Indonesia sedang mencoba membantu Thailand dalam menyelesaikan konflik di Thailand Selatan dengan memilih salah satu organisasi Islam besar di Indonesia yaitu Muhammadiyah. Indonesia yang sering melakukan kunjungan ke negara Thailand mendapat permintaan khusus untuk membantu dalam penyelesaian konflik ini.

Pemerintahan Thailand sempat berunding dengan perwakilan Muhammadiyah untuk membahas mengenai konflik berkepanjangan di Thailand Selatan. Pembahasan konflik ini

⁸ Lia, Aprilia. 'Upaya pemerintah Thailand dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan (2004-2009)' <[http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/19%20\(11-01-16-02-27-39\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/19%20(11-01-16-02-27-39).pdf) [Diakses pada 25 December 2016].

⁹ Thanet Aphornsuwan, *Origins of Malay Muslim "Separatism" in Southern Thailand*, Asia Research Institute, Singapore, October 2004.

¹⁰ *Ibid.* hal 35

dilakukan di tahun 2007, ketika Din Syamsudin selaku ketua PP Muhammadiyah pusat sedang berkunjung ke Thailand untuk berdialog dengan tokoh muslim yang ada di Patani.¹¹ Perundingan yang dilakukan dengan PM Thailand Surayud Chulanont menghasilkan sebuah wacana bahwa Muhammadiyah setuju dan ingin membantu saudara-saudara muslim yang ada di Thailand Selatan. Selanjutnya Muhammadiyah dalam konflik ini bukan sebagai mediator atau juru runding damai, akan tetapi sebagai faktor pendorong tampilnya Islam yang maju dan modern. Aspek-aspek yang dibahas juga meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dalam skala kecil.

Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi Islam yang paling berpengaruh juga di bidang pendidikan di Indonesia. Muhammadiyah telah lama berdiri dan mempunyai banyak sekali pergerakan dalam membela dan menegakkan agama mayoritas di Indonesia yaitu Islam. Banyak aspek yang telah dimasuki dan dijadikan pedoman untuk memajukan agama dan negara. Politik, sosial, budaya, ekonomi, agama dan pendidikan menjadi beberapa aspek penting dalam pembangunan karakter bangsa oleh Muhammadiyah.¹² Program yang diberlakukan dalam organisasi Muhammadiyah salah satunya adalah memperluas dakwah Islam sampai ke luar negeri. Hal inilah yang mendasari Muhammadiyah ingin membangun kerjasama dengan Thailand dan meneruskannya ke beberapa negara lain seperti Malaysia dan beberapa negara yang berada di wilayah ASEAN.

Program PP Muhammadiyah yang menjadikan ASEAN sebagai tempat untuk membangun kampus di luar negeri menjadikan hubungan antara luar negeri semakin erat. Kampus-kampus Muhammadiyah yang akan disebar nantinya dapat digunakan sebagai media untuk pertukaran

¹¹ Nal, *Din Syamsudin bakal bertandang ke Thailand Selatan*, Detik.news.com, diakses dalam <https://news.detik.com/berita/809478/din-syamsuddin-bakal-bertandang-ke-thailand-selatan>, (23 Januari 2018).

¹² Sejarah berdirinya Muhammadiyah, [<http://www.muhammadiyah.or.id/id/4-content-179-det-sejarah-berdiri.html>] Diakses pada 11/ 12/2017.

pelajar di Thailand Selatan. Dosen yang mempunyai pengalaman lebih asal Indonesia dapat dikirimkan ke luar negeri untuk berbagi informasi dan pengalaman dalam mengajar. Terlebih ketika ada mahasiswa Muhammadiyah yang ingin menggunakan kesempatan ini sebagai pemenuh mata kuliah seperti PKL atau praktek kerja lapang terkhusus di luar negeri akan lebih mudah aksesnya dikarenakan telah berjalannya proses kerjasama tersebut. Pengiriman siswa dan siswi dari Thailand Selatan yang kebanyakan beragama Islam ke Indonesia membuat resolusi konflik ini berjalan dengan baik. Generasi-generasi penerus Thailand khususnya Thailand Selatan haruslah memahami bagaimana menghadapi konflik berkepanjangan ini. Pendidikan yang mereka dapatkan di universitas-universitas Muhammadiyah yang ada di Indonesia, mempunyai tujuan untuk membawa dan membangun kedamaian bagi masyarakat Thailand Selatan sepulangnya mereka mencari ilmu di Indonesia.

Melihat fenomena konflik di Thailand Selatan yang sangat kompleks, penulis beranggapan bahwa perlu sekali mengetahui lebih dalam mengenai upaya Muhammadiyah dalam penerapan *peace-building* melalui aspek pendidikan di Thailand Selatan. Lebih jauh lagi bahawa konflik yang berkepanjangan ini masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah Thailand dan juga membutuhkan bantuan dari pihak luar negeri seperti kerjasama diplomatik antar negara. Muhammadiyah disini hadir menawarkan bantuan kepada pemerintah Thailand untuk sebuah resolusi konflik di bidang pendidikan. Keadaan konflik yang cukup mempengaruhi pembangunan dan kejiwaan masyarakat Thailand Selatan, menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas pendidikan diikuti dengan aspek lainnya. Bantuan pendidikan yang ditawarkan oleh Muhammadiyah nantinya juga bisa menjadi sebuah rujukan bagi peneliti lain agar dapat membantu resolusi konflik di Thailand Selatan.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya Muhammadiyah dalam proses *peace-building* melalui aspek pendidikan di Thailand Selatan?

1.3 Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diinginkan dari penulis adalah bagaimana pemahaman terhadap fenomena konflik yang terjadi di wilayah Thailand Selatan dan mengetahui sejauh mana efektifitas dari bentuk-bentuk kerjasama antara Pemerintah Thailand dan organisasi Muhammadiyah yang ada di Indonesia untuk memulihkan konflik di Thailand Selatan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Manfaat yang bisa didapatkan adalah pengetahuan tentang penyelesaian konflik dan bentuk-bentuk kerjasama yang telah dilakukan organisasi Muhammadiyah dalam menyelesaikan konflik di Thailand Selatan. Pemahaman di dalam tulisan ini nantinya juga mampu memotifasi para akademisi ataupun pengkaji ilmu internasional dalam pembahasan sebuah konflik khususnya yang terjadi di Thailand Selatan juga konflik yang hampir menyamai sebagai bahan penelitian.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pada masyarakat mengenai hal resolusi konflik di Thailand Selatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah selaku aktor dalam ranah organisasi internasional. Pembahasan dalam tulisan ini juga dapat menjadi sebuah acuan kepada organisasi Islam ataupun kepada lembaga masyarakat yang berkecimpung dalam pembahasan

konflik agar digunakan sebagai media perbandingan dalam pengkajian resolusi konflik selanjutnya.

1.4 . Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Thailand Selatan bukan merupakan hal yang baru di dunia akademik khususnya dalam Hubungan Internasional. Beberapa peneliti sebelumnya mencoba untuk mengkaji berbagai solusi yang di berikan kepada Thailand Selatan untuk penyelesaian konflik yang terjadi. Terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang Thailand Selatan dalam penyelesaian konfliknya ataupun dalam penggunaan konsep dan teori di penelitian sebelumnya, antara lain :

Pertama, penelitian yang berjudul ***Building Peace Through Participation : A Case Study of Northern Ireland*** oleh Daniela Nascimento, Michelem Jacobs dan Sarah Keeler.¹³ Sebuah jurnal yang membahas mengenai konflik persaudaraan yang terjadi di Irlandia Utara dimana perebutan wilayah terjadi. Pembahasan yang dibahas oleh mereka lebih kepada bagaimana PBB mencoba untuk menerapkan “*Standart Oprational Procedur*” dengan maksud untuk menata konflik dan membawa perdamaian pada Irlandia Utara. Mereka menggunakan pendekatan teori *peacebuilding* agar dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian konflik. Teori *peacebuilding* disini digunakan karena dirasa cocok sebagai metode resolusi konflik yang ada di Irlandia Utara dengan cara mengajak organisasi internasional PBB sebagai mediatornya. (baca jurnal perjelasan alur konflik dan penggunaan teori)

Penggunaan teori *peacebuilding* pada penelitian diatas merupakan cara yang cukup memberikan pengaruh kepada perubahan kesejahteraan di Irlandia Utara. Setelah cukup banyak

¹³ Daniela Nascimento, Michele Jacobs, dan Sarah Keeler dengan judul “ *Building Peace Through Participation : A Case Study of Northern Ireland*, Sebuah artikel yang sama membahas *peacebuilding* <<http://www.ces.uc.pt/nucleos/nep/documentos/DanielaNascimento.pdf>> [accessed 29 December 2016]

kerugian materi maupun moril, Irlandia Utara mencoba untuk bangkit dan berbenah diri. Teori ini mencakup pembangunan, penataan kembali dan penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat pasca konflik. Kesamaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan teori *peacebuilding* pada penelitiannya.

Kedua, skripsi yang berjudul ***Peran Aktor Non-state dalam Implementasi Peace-Building : Studi kasus Chevron Nigeria Limited di Delta Niger tahun 2005-2011*** oleh **Gumilar Rahadiyan Prasetya, Universitas Airlangga**.¹⁴ Gumilar mencoba menjelaskan peran aktor *non-state* dalam usahanya mengimplementasikan *peacebuilding* di suatu kawasan yang memiliki tingkat konflik yang tinggi. Chevron Nigeria Limited (CNL) merupakan salah satu aktor *non-state* yang terkategori dalam golongan *multinational corporations* dan menjalankan usaha *peacebuilding* di Delta Niger. Konflik yang terjadi di wilayah ini merupakan bentuk dari model konflik laten yang disebabkan oleh terjadinya disparitas pengelolaan sumber daya alam berupa gas dan minyak bumi. Hingga pada akhir konflik yang tersebut diperoleh kesepakatan antara pihak-pihak terkait untuk mewujudkan perdamaian. Usaha penciptaan dan membangun perdamaian tersebut ternyata aktor yang berperan tidak hanya aktor *state* saja namun juga banyak dipengaruhi oleh aktor *non-state*. CNL sebagai aktor *non-state* mampu menciptakan stabilitas kawasan pasca konflik berkepanjangan yang terjadi. Stabilitas dapat terlihat dari reaksi dan respon positif dari aktor-aktor lain terkait usaha *peacebuilding* yang dilakukan. Ketika melakukan usaha penciptaan dan membangun perdamaian di Delta, Niger, CNL berjalan dengan kaidah *corporate social responsibility* (CSR) yakni sebagai bentuk tanggung jawab sosial di tempatnya melakukan eksplorasi guna kepentingan perusahaan tersebut. Dalam menjelaskan fenomena ini peneliti

¹⁴ Gumilar Rahadiyan Prasetya, 'Peran Aktor Non-State dalam implementasi Peace-Building' Jurnal Skripsi yang sama teorinya membahas tentang *Peace-Building*. < <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi95d2a3a6252full.pdf> > [Diakses pada 26 December 2016]

menggunakan teori “peran *multinational corporation* dalam *peacebuilding*”, “relasi *peacebuilding* dan CSR”, dan konsep “stabilitas kawasan”.

Penelitian di atas mempunyai kesamaan pada penerapan *peace-building* yang dilakukan pada CNL di Delta, Niger. Ketimpangan dalam konflik ini menyebabkan kurang sejahteranya masyarakat yang ada di sekitar pengelolaan sumber daya alam gas dan minyak bumi. Penggunaan *peacebuilding* di sini mempunyai peran yang cukup mambantu dalam menstabilkan kesejahteraan juga membuat konflik mereda. Kesamaan yang terdapat pada penelitian diatas adalah penggunaan teori *peacebuilding* sebagai bentuk pemerintah dan bantuan CNL dalam meredakan konflik. Peran aktor yang berpengaruh antara pemerintah Niger dan CNL juga sama dilakukan oleh penulis dalam konflik di Thailand Selatan yaitu antara pemerintah Thailand dibantu non-state organisasi islam Muhammadiyah dalam meredakan konflik.

Ketiga, Sebuah penelitian yang berjudul ***Pembaharuan Pendidikan Islam haji Sulong di Patani tahun 1927-1954*** oleh Miss Hannan Bueraheng dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁵ Bahasan dari penelitian ini adalah peranan tokoh Haji Sulong dalam bidang pendidikan di Thailand Selatan. Pada tahun 1927 Sulong membangun sebuah pondok yang berlokasi di Patani Selatan. Perjalanan Haji Sulong untuk membantu pendidikan yang ada di Patani yaitu mendirikan pendidikan tradisional madrasah, dan pondok madrasah. kesungguhan dan kesabarannya membuat dia terkenal dan menjadi salah satu pejuang pendidikan pada saat itu. Perjuangan untuk menjaga harkat dan martabat masyarakat Melayu Patani membuat berbagai dukungan yang datang kepadanya memperkuat perjuangannya untuk pendidikan. Kebijakan pemerintah Thailand yang tidak mendukung msayarakat disana membuat berbagai gejolak dan

¹⁵ Miss Hannan Bueraheng, *Pembaharuan pendidikan Islam Haji Sulong di Patani 1927-1954*. Sebuah skripsi yang sama membahas Thailand Selatan, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2015.

konflik yang menyebabkan kurangnya dukungan untuk masyarakat Melayu Patani. Pada akhirnya harus ada yang bergerak untuk dapat meningkatkan mutu masyarakat salah satunya dalam bidang pendidikan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan sosiologi. Pendekatan ini digunakan untuk kajian ilmiah tentang kehidupan sosial manusia yang berusaha mencari tahu tentang hakikat dan sebab dari berbagai pola pikir dan tindakan manusia disekitar kita. Berbeda dengan psikologi yang memusatkan perhatiannya pada karakteristik pikiran dan tindakan orang perorangan, sosiologi hanya tertarik pada tindakan dan perilaku yang ditimbulkan seseorang sebagai salah satu anggota masyarakat. Teori yang di gunakan yaitu teori Behavioral, yaitu sebuah teori yang di cetuskan oleh Gage dan Barliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman yang terjadi.

Terdapat kesamaan antara peneliti di atas dengan penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai majunya pendidikan di Thailand Selatan. Hal ini merujuk pada sebuah daerah yang bernama Patani yang dijadikan bahan penelitian bagi peneliti diatas. Pendidikan yang menjadi sasaran peningkatan mutu untuk masyarakat mendasari peneliti untuk mengembangkan potensi pendidikan di Thailand Selatan dimulai dari daerah Patani. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu penerapan teori *peacebuilding* dalam menghadapi konflik di Thailand Selatan. Sedangkan yang membedakan dari tulisan peneliti adalah penggunaan teori sosiologi behavioral yang digunakan untuk mensurvei konflik dari segi masyarakat di wilayah Thailand Selatan.

Keempat, Sebuah tulisan yang berjudul ***Peran NATO dalam penyelesaian konflik Etnis di Macedonia*** oleh Gita Adhisti Wisnu Wardani, Universitas Negeri Jember.¹⁶ Konflik etnis

¹⁶ Gita Adhisti Wisnu Wardani, “Peranan Nato dalam penyelesaian konflik etnis di Macedonia”. Sebuah jurnal yang membahas mengenai Macedonia (Unej, 16 April 2014).

yang terjadi di Macedonia disebabkan adanya ketegangan yang terjadi antara dua etnis, yaitu etnis Macedonia sebagai etnis mayoritas dan etnis Albania sebagai etnis minoritas. Ketegangan pertama kali terjadi pada 25 Januari 2001, yang ditandai dengan penyerangan kantor polisi di desa Tanusevci oleh pemberontak etnis Albania. Atas dasar pertahanan militer yang lemah, Presiden Macedonia meminta bantuan kepada institusi internasional seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan NATO untuk membantu pemerintah mengatasi krisis yang hampir mengarah pada perang sipil. Kehadiran NATO di Macedonia diawali dengan tercapainya Ohrid Framework Agreement. Perjanjian Ohrid berisikan kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Perjanjian Ohrid menjadi mandat yang melegitimasi NATO untuk memasuki ranah konflik di Macedonia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran apa saja yang telah dilakukan oleh NATO dalam penyelesaian konflik etnis di Macedonia pada tahun 2001-2003. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran NATO dalam penyelesaian konflik etnis di Macedonia terlihat dalam dua operasi yang telah sukses dilaksanakan. Dua operasi tersebut adalah *peacekeeping* operation yang meliputi operasi Essential Harvest, operasi Amber Fox, dan *peacebuilding* operation yang terlihat dalam operasi Allied Harmony. Kedua operasi NATO tersebut berhasil membawa perdamaian dan stabilitas keamanan Macedonia.

Penelitian diatas mempunyai kesamaan dalam penggunaan teori dalam penyelesaian konfliknya yaitu penggunaan teori *peacebuilding*. Pada penelitian diatas penggunaan *peacebuilding* dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konflik yang terjadi di Macedonia. Terdapat aktor non-state yaitu NATO yang ternyata juga menjadi penjemabatan atas konflik guna memberikan sebuah solusi yang terbaik pada kedua etnik yang sedang berselisih. Sedangkan yang menjadi pembeda antara penulis dan penelitian di atas adalah pada penggunaan teori tambahan

yaitu teori *peacekeeping operation* sebagai bentuk mempertahankan kesejahteraan dari kedua belah pihak.

Kelima, Skripsi yang berjudul **“Peran *United Nation Children’s Emergensi Fund (UNICEF)* Dalam Pengembangan Pendidikan di Negara Laos Melalui Program *Early Childhood Education (ECE)* Tahun 2011-2014”** oleh Cahaya Septiadi Rachman, mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.¹⁷

Pengembangan pendidikan yang dilakukan di negara Laos sangat diperlukan. Mengingat kesadaran masyarakat yang tinggal disana belum terlalu memprioritaskan pada aspek pendidikan. Hal yang terparah juga dialami oleh anak-anak dimana seharusnya mereka mengenyam pendidikan sejak di usia dini. UNICEF sebagai organisasi PBB yang berkecimpung dalam dunia pendidikan mencoba memberikan sebuah solusi dengan program *Early Childhood Education (ECE)* untuk menangani keadaan pendidikan di Laos yang kian memburuk. Konsep organisasi internasional yang diterapkan pada pembahasan ini sangat berguna sekali karena PBB sebagai organisasi yang mempunyai banyak macamnya mampu membantu keadaan pendidikan di Laos melewati UNICEF.

Konsep organisasi internasional pada penelitian diatas merupakan konsep yang juga digunakan oleh penulis. Perbedaanya hanya terdapat dalam pembahasan yang dilakukan antara peneliti di atas dan penulis tertuju pada fenomena lain dengan fokus konflik yang juga berbeda. Dalam hal ini penulis menggunakan organisasi Muhammadiyah untuk membantu Thailand Selatan, sedangkan peneliti di atas membantu Laos dengan bantuan salah satu cabang organisasi

¹⁷ Cahaya Septiadi Rachman, “Peran *United Nation Children’s Emergensi Fund (UNICEF)* Dalam Pengembangan Pendidikan di Negara Laos Melalui Program *Early Childhood Education (ECE)* Tahun 2011-2014” Skripsi. Malang. Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

PBB yaitu UNICEF. Peran organisasi internasional ini dalam melihat kedua fenomena ini mempunyai karakteristik yang bersifat sebagai pen jembatan konflik. Meskipun penulis dan peneliti sama-sama mengkaji tentang pendidikan, akan tetapi mencakup wilayah yang berbeda antara Laos dan Thailand Selatan.

Pada lima penelitian di atas dapat diambil sebuah persamaan bahwa tulisan dari penulis membahas tentang konflik yang terjadi di Thailand Selatan dengan teori *peacebuilding* dan konsep organisasi internasional. Penggunaan teori *peacebuilding* hanya pada penelitian pertama, kedua dan keempat yang menjadi salah satu contoh dari pengaplikasiannya. Sedangkan sisanya diambil kesamaan yang tertuju pada penggunaan konsep dan pengkajian di wilayah yang sama. Menurut penulis sangat berkaitan sekali antara teori *peacebuilding* dan konsep organisasi internasional melihat konflik berkepanjangan yang terjadi di Thailand Selatan. Agar terwujud sebuah resolusi konflik maka penulis menggunakan konsep organisasi internasional dalam hal ini yang menjadi aktor adalah organisasi dari negara Indonesia yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah yang telah menjalin kerjasama dengan Thailand ingin membantu dalam sektor pendidikan agar terwujudnya perdamaian di Thailand Selatan. Teori dan konsep yang digunakan oleh kelima penelitian diatas memberikan gambaran pada penulis bahwa dalam penerapan dari teori *peacebulding* dan konsep organisasi internasional keduanya dirasa cocok untuk digunakan sebagai landasan dalam pengembangan masalah. Akan tetapi terdapat perbedaan penggunaan teori dan konsep dari kelima penelitian di atas yang juga menyesuaikan dengan fenomena konflik penyelesaiannya.

Tabel 1 Posisi Penelitian

NNo.	Nama Peneliti & Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
11	Daniela dkk	Jenis Penelitian: Deskriptif	PBB mencoba untuk memberikan solusi berupa

	<i>"Building Peace Participation : A Case Study of Northern Ireland"</i>	Alat Analisa: Peace-building dan kepentingan nasional	<i>"Standart Oprational Procedur"</i> dengan maksud untuk membawa perdamaian pada Irlandia Utara. Mereka mencoba untuk membuat sebuah pendekatan untuk menyeimbangkan bagaimana konsep <i>peace-building</i> dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian masalah tersebut.
22	Gumilar "Peran Aktor Non-state dalam Implementasi <i>Peacebuilding</i> : Studi kasus Chevron Nigeria Limited di Delta Niger tahun 2005-2011"	Jenis Penelitian: Deskriptif Alat Analisa: Pendekatan peran Multinational Cooperation dan Stabilitas kawasan	CNL sebagai aktor <i>non-state</i> mampu menciptakan stabilitas kawasan pasca konflik berkepanjangan yang terjadi. Stabilitas dapat terlihat dari reaksi dan respon positif dari aktor-aktor lain terkait usaha <i>peacebuilding</i> yang dilakukan. Dalam melakukan usaha penciptaan dan membangun perdamaian di Delta Niger, CNL berjalan dengan kaidah <i>corporate social responsibility</i> (CSR) yakni sebagai bentuk tanggung jawab sosial di tempatnya melakukan eksplorasi guna kepentingan perusahaan tersebut.
33	Hannan "Pembaharuan Pendidikan Islam haji Sulong di Patani tahun 1927-1954"	Jenis Penelitian: Eksplanatif Alat Analisa: Pendekatan Level individu	Haji Sulong dalam bidang pendidikan di tahun 1927 membangun sebuah pondok yang berlokasi di Patani Selatan. Perjalanan Haji Sulong untuk membantu pendidikan yang ada di Patani yaitu mendirikan pendidikan tradisional madrasah, dan

			pondok madrasah membuat perkembangan cukup pesat pada Patani saat itu.
44	Gita “Peran NATO dalam penyelesaian konflik Etnis di Macedonia”	Jenis Penelitian :Eksplanatif Alat Analisa : Kepentingan Nasional dan Peranan Multinasional Cooperation	bahwa peran NATO dalam penyelesaian konflik etnis di Macedonia terlihat dalam dua operasi yang telah sukses dilaksanakan. Dua operasi tersebut adalah <i>peacekeeping operation</i> yang meliputi operasi <i>Essential Harvest</i> dan operasi <i>Amber Fox</i> , dan <i>peacebuilding operation</i> yang terlihat dalam operasi <i>Allied Harmony</i> . Kedua operasi NATO tersebut berhasil membawa perdamaian dan stabilitas keamanan Macedonia.
55.	Cahaya Septiadi Rachman, mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, “ <i>Peran United Nation Children’s Emergensi Fund (UNICEF) Dalam Pengembangan Pendidikan di Negara Laos Melalui Program Early Childhood Education (ECE) Tahun 2011-2014</i> ”	Jenis penelitian : Deskriptif Alat analisa : Konsep Organisasi Internasional, Pendekatan rezim	Melalui Program <i>Early Childhood Education (ECE)</i> UNICEF membantu anak-anak agar dapat bersekolah dengan kesiapan mental yang cukup. Melalui program <i>Early Childhood Education (ECE)</i> UNICEF membantu anak-anak agar mendapatkan pendidikan yang baik tanpa memikirkan kendala-kendala yang ada. Pelaksanaan program ECE dilakukan melalui 3 pilar utama yaitu, peningkatan layanan dan fasilitas pendidikan usia dini,

			edukasi terhadap orang tua, edukasi terhadap guru atau tenaga pengajar. Program ECE yang telah dilaksanakan menghasilkan peningkatan dalam beberapa aspek pendidikan usia dini di Laos seperti peningkatan layanan dan fasilitas pendidikan usia dini, peningkatan terhadap pemahaman orang tua dan guru.
5	Yarobbi ikhsan, mahasiswa jurusan Hubungan internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, “Upaya Muhammadiyah dalam pembangunan <i>peacebuilding</i> melalui pendidikan di Thailand Selatan.	Jenis penelitian : Deskriptif Alat analisa : <i>Peacebuilding dan konsep organisasi internasional</i>	Konflik berkepanjangan yang di alami oleh Thailand Selatan membuat pemerintah Thailand pusat menggagas untuk meminta bantuan kepada salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah. Kerjasama antar negara antara indonesia dan Thailand telah terbentuk dan membuat bantuan terhadap konflik ini menjadi lebih mudah. Muhammadiyah yang juga telah berkali-kali berkunjung ke negara Thailand menjadi tertarik untuk memberikan bantuan agar konflik dapat diredakan. Melalui bidang pendidikan, Muhammadiyah mencoba untuk membantu memulihkan kembali keseharian dari masyarakat khususnya siswa siswi yang ingin bersekolah seperti sebelumnya. Bantuan yang diberikan Muhammadiyah berupa pengiriman guru,

			pertukaran pelajar khususnya di Pattani, dan melakukan pendekatan moral pada masyarakat yang terkena trauma akan konflik yang bekepanjangan.
--	--	--	--

1.5. Kerangka Konsep dan Pendekatan

1.5.1 Teori Resolusi Konflik (*Peace-Building*)

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori Resolusi konflik *Peace Building* menurut salah satu pakar perdamaian yaitu Johan Galtung. Galtung menyatakan bahwa sebuah perdamaian harus memiliki struktur yang berbeda ketika konflik, dimana dalam struktur tersebut harus menghilangkan setiap benih konflik baru baik struktur pemerintahan maupun relasi sosial masyarakat. Selanjutnya ia mengatakan bahwa *peacebuilding* itu harus menghilangkan penyebab dasar dari konflik dan perlu adanya dukungan kapasitas terhadap lokal dalam upaya mengelola perdamaian serta penyelesaian konflik.¹⁸ Merupakan cerminan yang terjadi di beberapa negara dari adanya gesekan akibat perbedaan pendapat antara aktor-aktor yang terlibat sengketa. Aktor-Aktor ini dapat berwujud negara dengan negara bahkan negara dengan beberapa kelompok yang menginginkan pemikirannya untuk didengar dan diprioritaskan.

Terdapat beberapa konflik yang dapat diselesaikan, namun pada kenyataannya penyelesaian konflik tersebut masih menghasilkan *negative peace*. *Negative peace* ini adalah keadaan dimana perdamaian masih belum benar-benar terlaksana karena masih terdapat potensi konflik yang berakibat pada konflik yang lebih besar dari sebelumnya. Perlu sekali membuat sebuah proses resolusi konflik untuk merubah *negative peace* menjadi *positive peace*. Pencapaian

¹⁸ Johan Galtung, *Theories of peace : A Synthetic Approach to Peace Thinking*. September 1967. International Peace Research Institute, Oslo. Hal 87-89

yang akan dicapai dari *positive peace* ini akan menghasilkan sebuah pendekatan-pendekatan yang lebih focus. Galtung menjabarkan ini dalam 4 tahapan pendekatan yaitu *peacemaking*, *peacebuilding*, *peacekeeping*, dan *peacesettlement*.¹⁹ Melihat konflik yang terjadi di Thailand Selatan membuat Indonesia berkeinginan untuk mencoba, membantu, dan memberikan sedikit solusi dalam bidang pendidikan dengan tujuan jangka panjang.

Sebuah perdamaian akan terwujud apabila dimulai dari ide-ide dan rencana untuk menuju kepada pembangunan kembali setelah konflik atau *peacemaking*. Perdamaian yang terus di bahas dan menjadi agenda utama dalam pembahasan suatu negara akan membuahkan pemikiran dimulainya pembangunan yang merata pada daerah konflik atau *peacebuilding*. Sedangkan setelah pembangunan terlaksana maka yang dibutuhkan adalah menjaga kedamaian setelah konflik agar terbentuk sebuah keseimbangan yang merata pada seluruh daerah tidak hanya pada daerah konflik sebelumnya. Penulis disini lebih memfokuskan kepada Melalui proses *peacebuilding* diharapkan *negative peace* (atau *the absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan social, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.²⁰ Istilah *peacebuilding* pertama kali muncul pada tahun 1970an melalui karya Johan Galtung yang menyerukan pembentukan struktur *peacebuilding* untuk mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan dengan menangani akar permasalahan konflik kekerasan dan mendukung kapasitas masyarakat adat untuk pengelolaan perdamaian dan resolusi konflik.²¹ Sejak saat itu, istilah *peacebuilding* telah meliputi latihan dan tugas multidimensi mulai dari melucuti senjata faksi-faksi yang bertikai dengan pembangunan kembali institusi politik, ekonomi, yudikatif dan masyarakat sipil.

¹⁹ ibid hal 90

²⁰ Ibid hal 105

²¹ Louis, Hamburg. 'About Peace-Building on world perception' Diakses dari [https://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pbun.shtml] pada 12/ 9/2017.

Pada tahun 2007, Komite Kebijakan Sekretaris Jenderal PBB menyetujui dasar konseptual untuk membangun perdamaian untuk memberi tahu praktik PBB yaitu : *"Pembangunan Perdamaian melibatkan serangkaian tindakan yang ditargetkan untuk mengurangi risiko terjerumus dalam konflik dengan memperkuat kapasitas nasional di semua tingkat untuk konflik, manajemen, dan meletakkan fondasi untuk perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Strategi pembangunan perdamaian harus koheren dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik negara yang bersangkutan, berdasarkan pada kepemilikan nasional, dan harus terdiri dari serangkaian kegiatan yang diprioritaskan secara cermat, diurutkan, dan oleh karena itu relatif sempit untuk mencapai tujuan."*²²

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand menjadi sebuah acuan di mana perdamaian akan terwujud dari beberapa usaha termasuk dengan mengajak organisasi Muhammadiyah. Konflik di Thailand Selatan yang menjadi lebih brutal diakibatkan oleh penanganan langsung dari pihak militer Thailand yang mengesampingkan kepentingan masyarakat. Solusi yang diberikan pun cukup kasar dan bersifat memaksa pada kebanyakan masyarakat Thailand Selatan tanpa melihat anak-anak atau perempuan bahkan orang yang sudah tua. *Peacebuilding* yang di terapkan oleh Muhammadiyah menjadi salah satu cara untuk meredakan konflik yang terjadi terutama di daerah Pattani, Thailand Selatan. Setelah beberapa rencana yang dibuat oleh pemerintah Thailand dalam menanggulangi konflik telah dijalankan dan tidak membuahkan hasil. Muhammadiyah hadir sebagai penghubung kedua belah pihak antara pemerintah Thailand dan masyarakat Thailand Selatan yang masih berkonflik. Tawaran yang diberikan oleh Muhammadiyah pun termasuk membangun dan dapat meringankan konflik berkepanjangan ini. Akhirnya bidang pendidikan yang dijadikan salah satu patokan utama dalam

²² ibid.

misi perdamaian ini dengan maksud membangun mental para korban konflik di Thailand Selatan. Pengiriman pengajar dan pertukaran yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan pemerintah Thailand menjadi sebuah usaha yang nantinya akan menghilangkan penyebab konflik dan terbentuk sebuah perdamaian.

berlatar belakang sejarah kedaulatan yang pada saat itu dipegang oleh Patani Darussalam. Sejarah menulis bahwa sebelum negeri Patani Darussalam menjadi kekuasaan pemerintahan Thailand pada tahun 1902, negeri ini memiliki sejarah yang cukup lama dibandingkan dengan sejarah negeri-negeri Melayu lainnya.²³

Negeri ini hampir sama bentuk pemerintahannya seperti beberapa kerajaan yang ada di Nusantara pada saat itu yaitu diperintah oleh kesultanan Islam Melayu. Pernah juga dikenal sebagai pusat pelabuhan yang terletak di sekitar Laut Cina Selatan yang kemakmurannya menjadi incaran oleh musuh bangsa Melayu yaitu Siam atau saat ini Thailand. Apabila dilihat dari segi geografisnya, negeri Patani Darussalam berperan penting dari segi pemikiran keagamaan, pendidikan Islam, ekonomi perdagangan serta kestabilan politik dan pemerintahannya ketika masih menjadi kerajaan. Oleh karena itu Sejarah Islam di Patani tidak pernah lepas dari konflik terutama ketika wilayah Patani telah dikuasai oleh penguasa Thailand.

2.2.1 Konflik masa lalu dengan Pattani Darussalam

Pada pertengahan tahun 1768 adalah awal mula dari konflik yang terjadi di kawasan Patani, Narathiwat, Yala, dan Songkhla. Pada saat itu Kerajaan Siam berhasil menakhlukkan kerajaan Patani dengan cara peperangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Taktik perang atau strategi perang yang digunakan oleh kerajaan Siam dalam keberhasilannya atas penguasaan terhadap kerajaan Patani adalah dengan cara “Pecah dan Perintah”.²⁴ Cara ini digunakan oleh Siam agar

²³ Syukri, I. (2002) Sejarah Kerajaan Melayu Patani. Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia, hal 81.

²⁴ ibid hal 83.

dapat memecah belah persatuan dan melemahkan pimpinan-pimpinan Melayu supaya tidak bangkit dan berinisiatif untuk memulai pemberontakan. Pada saat itu negeri Patani telah di pecah menjadi tujuh bagian wilayah dan di setiap wilayah tersebut telah terpilih pemimpin yang dijadikan boneka dengan tujuan menguasai Melayu. Proses pemecahan ini sengaja dibuat agar Siam dapat menjadi pusat kekuatan di Melayu dan untuk menghadang para penjajah lain dari Eropa yang kebanyakan diantara mereka telah mengincar wilayah Asia Tenggara dalam segi perdagangan.

Proses *desentralisasi* atau pemusatan kekuasaan ini menjadi sangat penting sekali bagi Siam untuk proses menakhlukkan Patani dilihat dari letak yang strategis dapat dimanfaatkan bangsa Eropa khususnya untuk perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Keadaan wilayah Timur Sungai Mekong pada saat itu dikuasai oleh Prancis serta masih berkuasa di wilayah Timur Laut Burma dan Laut Cina Selatan yaitu kerajaan Inggris yang juga menjadi ancaman yang cukup berat untuk Siam dalam mempertahankan wilayahnya.²⁵ Maka hal ini menjadi alasan Kerajaan Siam sangat gencar sekali dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wilayahnya.

Oleh karena itu dibuatlah sebuah peraturan yang diperkenalkan oleh Raja Chulalongkorn pada tahun 1897 untuk mewujudkan dasar dari asas desentralisasi yang mereka buat.²⁶ Pada masa pemerintahannya, Raja memerintah wilayah dengan menggunakan sistem *Thesaphiban* dimana penggunaannya telah di seragamkan di seluruh wilayah yang akibatnya pada pudarnya otonomi dengan keragaman.

Kemenangan yang didapat oleh kerajaan Burma ini dipatahkan oleh China yang pada saat itu menyerang wilayah burma akibatnya gagal mempertahankan wilayah Ayutthaya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh salah satu jendral Ayutthaya yang sempat kabur ke wilayah Siam Tenggara dan membuat sebuah kelompok baru untuk merebut kembali wilayahnya atas Burma. Jendral

²⁵ Ibid hal 85.

²⁶ Ibid hal 86

Taksin berhasil menakhlukkan satu persatu wilayah Ayutthaya bersama dengan pasukan baru yang dipimpinnya bahkan memperluas wilayahnya hingga Laos, Kamboja, dan Semenanjung Malaka bagian utara. Setelah masa kekuasaan Taksin berakhir karena terbunuh, kekuasaan selanjutnya dipegang oleh jendral bawahannya yaitu Chakkri yang kemudian di beri gelar “Rama I “. Berkuasanya Rama I maka dimulainya dinasti modern Siam yang turun temurun sampai saat ini mendiami tahta kerajaan.²⁷ Raja-raja selanjutnya yang memegang tahta kerajaan Siam sangat mempertahankan kemerdekaannya meskipun beberapa kali Burma menyerang. Kurang lebih sekitar 700 tahun kerajaan Siam tidak pernah dijajah oleh kekuatan asing karena sistem kerjasama yang mereka jalin antar negara dengan regulasi yang cukup ketat. Akhirnya pada tahun 1948, kerajaan Siam resmi mengganti nama menjadi kerajaan Thailand dengan menerapkan sistem monarki konstitusional dan raja yang memimpin sampai saat ini yaitu Raja Vajiralongkorn atau Rama X dari dinasti Chakri.²⁸

2.2 Konflik di Thailand Selatan

Negara Thailand memang biasa disebut negara gajah putih yang cukup terkenal diantara negara-negara di Asia Tenggara yang tak pernah dijajah. Sejarah yang cukup panjang juga dimiliki oleh negara ini sendiri karena juga sempat berebut wilayah negara seperti Burma. Pada awal kekuasaan kerajaan Sukothai provinsi Patani, Narawat, dan Yala mempunyai identitas sejarah kenegaraan, keagamaan dan kebudayaan di wilayah Thailand Selatan yang sangat berbeda dari wilayah Thailand lainnya. Tiga wilayah ini secara umum merupakan daerah kekuasaan politik yang berlatar belakang sejarah kedaulatan yang pada saat itu dipegang oleh Patani Darussalam.

²⁷ Ibid hal 35

²⁸ Masa pemerintahan Raja Vairalongkorn di mulai dari tahun 2016 menggantikan ayahandanya yang telah meninggal sampai saat ini (2018). Di akses <http://www.wisatathailand.com/sejarah/>

Sejarah menulis bahwa sebelum negeri Patani Darussalam menjadi kekuasaan pemerintahan Thailand pada tahun 1902, negeri ini memiliki sejarah yang cukup lama dibandingkan dengan sejarah negeri-negeri Melayu lainnya.²⁹

Negeri ini hampir sama bentuk pemerintahannya seperti beberapa kerajaan yang ada di Nusantara pada saat itu yaitu diperintah oleh kesultanan Islam Melayu. Pernah juga dikenal sebagai pusat pelabuhan yang terletak di sekitar Laut Cina Selatan yang kemakmurannya menjadi incaran oleh musuh bangsa Melayu yaitu Siam atau saat ini Thailand. Apabila dilihat dari segi geografisnya, negeri Patani Darussalam berperan penting dari segi pemikiran keagamaan, pendidikan Islam, ekonomi perdagangan serta kestabilan politik dan pemerintahannya ketika masih menjadi kerajaan. Oleh karena itu Sejarah Islam di Patani tidak pernah lepas dari konflik terutama ketika wilayah Patani telah dikuasai oleh penguasa Thailand.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif-analisis yang bertujuan menggambarkan hasil yang diperoleh selama penelitian melalui data yang telah dikumpulkan. Penelitian deskriptif-analisis dirasakan cocok karena penelitian ini membutuhkan data pasti untuk menyelesaikan analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mencoba untuk menjelaskan secara rinci tentang konflik yang terjadi di Thailand Selatan yang berlangsung cukup lama. Masalah yang diteliti oleh penulis lebih terfokus dalam menjawab pertanyaan “bagaimana” dan karakteristik dari konflik agar fakta-fakta secara jelas dapat disampaikan kepada pembaca. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai konflik di

²⁹ Syukri, I. (2002) Sejarah Kerajaan Melayu Patani. Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia, hal 81.

Thailand Selatan diperoleh dari hasil pengkajian dan studi literatur. Berkumpulnya data yang diperoleh dari hasil tersebut kemudian digunakan untuk menelaah dan menjelaskan perihal konflik, peran pemerintah Thailand, dan bantuan dari luar negara Thailand untuk dijadikan bahan tinjauan lebih lanjut. Pengukuran data yang cukup dan tidak berlebihan ini nantinya juga akan menjelaskan posisi Muhammadiyah sebagai organisasi islam di Indonesia yang juga berpengaruh pada *peacebuilding* yang ada di Thailand Selatan.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu analisa dilakukan dengan mengumpulkan sumber data dari pengumpulan data didapat dari penelitian kepustakaan yang mana dilakukan dengan tiga alur yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penulis terus menggali data sebanyak-banyaknya melalui sumber-sumber yang terpercaya melalui wawancara sebagai data primer dan juga data sekunder seperti jurnal, buku, serta website yang terpercaya sehingga data yang telah diperoleh dapat disimpulkan tanpa adanya kekeliruan untuk kemudian dipresentasikan dengan baik.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis memberi batasan materi dan batasan waktu pada penelitian ini sehingga pembahasan dalam penelitian ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fokus yang telah penulis tetapkan sejak awal.

A. Batasan Materi

Penelitian ini hanya membahas mengenai Peran organisasi Muhammadiyah dalam menangani dan membantu penyelesaian konflik di Thailand Selatan dan melihat bentuk-bentuk dari program pendidikan yang telah Muhammadiyah lakukan di

Thailand khususnya di Thailand Selatan tanpa menyangkutpautkan hubungan dengan negara lainya.

B. Batasan waktu

Penelitian ini dapat meluas dan tidak terarah apabila tidak dibatasi dalam hal waktu, maka penulis memutuskan untuk memberi batasan waktu pada penelitian ini yakni akan membahas peran Muhammadiyah di Thailand Selatan dalam bidang pendidikan untuk membantu penyelesaian konflik di tahun 2005-2009. Penulis memilih tahun 2005 dikarenakan pada tahun itu terjadi proses yang cukup signifikan dalam resolusi konflik di Thailand Selatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan kelompok-kelompok pemberontak yang semakin bertambah luas membuat tahun itu menjadi tahun pertumbuhan terbesar bagi sejarah pemberontakan di Thailand. Sedangkan di tahun 2010 adalah ketika Muhammadiyah membantu dan memulai untuk resolusi konflik di Thailand Selatan.

1.6.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil sumber wawancara dari beberapa narasumber yang terpercaya untuk dimintai data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai data primer. Penelitian ini juga mencari dan mengumpulkan data yang sesuai dan kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data yang ada hingga hasil diperoleh diakhir. Data ini diperoleh dari buku, media cetak, jurnal, dan sumber-sumber internet sehingga jenis data merupakan data sekunder.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB	JUDUL	ISI

1	Pendahuluan	<p>1.1 Latar Belakang</p> <p>1.2 Rumusan Masalah</p> <p>1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian</p> <p>1.3.1 Tujuan Penelitian</p> <p>1.3.2 Manfaat Penelitian</p> <p>1.3.2.1 Manfaat Akademis</p> <p>1.3.2.2 Manfaat Praktis</p> <p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5 Kerangka Konsep dan Teori</p> <p>1.6 Metodologi Penelitian</p> <p>1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p>1.6.2 Metodologi Penelitian</p> <p>1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p>1.6.3.1 Batasan Materi</p> <p>1.6.3.2 Batasan waktu</p> <p>1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data</p> <p>1.6.5 Sistematika Penulisan</p>
2	Dinamika konflik di Thailand Selatan	<p>Memaparkan awal mula sejarah Thailand Selatan menjadi kekuasaan Kerajaan Siam hingga menjadi bagian dari Negara Thailand yang sampai saat ini berkonflik juga awal mula bantuan Muhammadiyah kepada beberapa daerah yang ada di Thailand Selatan.</p> <p>2.1 Sejarah Thailand</p> <p>2.2 Konflik di Thailand Selatan</p> <p>2.2.1 Konflik masa lalu dengan Pattani Darussalam</p> <p>2.2.2 Pemaksaan asimilasi dari segi linguistik, kebudayaan dan agama</p> <p>2.2.3 Perbedaan pendapatan ekonomi</p> <p>2.3 Kebijakan pemerintah Thailand dan respon dunia internasional terhadap konflik</p>

		<p>2.3.1 Kebijakan pemerintah Thailand</p> <p>2.3.2 Respon dari dunia internasional terhadap konflik di Thailand Selatan</p> <p>2.3.2.1 Respon Organisasi Internasional</p> <p>2.3.2.2 Respon Negara regional di wilayah Asia Tenggara</p>
3	Organisasi Muhammadiyah dalam resolusi konflik di Thailand Selatan	<p>Menjelaskan tentang latar belakang organisasi Muhammadiyah beserta gerakan-gerakannya juga tujuan pergerakannya yang mendasari untuk membantu konflik di Thailand Selatan dalam aspek pendidikan.</p> <p>3.1 Organisasi Muhammadiyah</p> <p>3.2 Lahirnya Muhammadiyah di Indonesia</p> <p>3.3 Pergerakan Organisasi Muhammadiyah</p> <p>3.4 Muhammadiyah dalam konflik Thailand Selatan</p>
4	Penyelesaian konflik yang di lakukan oleh pemerintah Thailand dengan bantuan organisasi Muhammadiyah	<p>Konsep <i>peacebuilding</i> yang dikemukakan oleh Johan Galtung digunakan untuk membantu mengatasi konflik di Thailand Selatan secara bertahap. Proses <i>peacebuilding</i> yang di lakukan oleh organisasi Muhammadiyah atas konflik di Thailand Selatan menjadi penyembuh bahkan memadamkan konflik dengan memberikan hak-hak pada korban konflik dan masyarakatnya.</p> <p>4.1 Penyelesaian konflik dengan <i>peacebuilding</i></p>

		4.2 Pembangunan pada bidang pendidikan
5	Penutup	<p>Menjelaskan kembali dengan ringkas, bagaimana Muhammadiyah menerapkan <i>peacebuilding</i> untuk konflik Thailand Selatan dalam aspek pendidikan. Serta saran untuk peneliti selanjutnya.</p> <p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>

